BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan laporan resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, daerah ini berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama sepuluh tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2014 hingga 2023, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, serta mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, capaian opini WTP tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan kualitas laporan keuangan yang optimal, khususnya pada tingkat operasional di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas laporan keuangan yang optimal di tingkat operasional, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini terlihat dari masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meskipun menurun dari 14 temuan menjadi 8 temuan pada tahun 2023, tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek penyajian laporan keuangan, seperti kesalahan klasifikasi akun, ketidaksesuaian pencatatan transaksi, serta lemahnya dokumentasi pendukung. Fenomena ini mengindikasikan adanya gap antara pencapaian opini WTP secara agregat dengan kualitas riil laporan keuangan pada level OPD, sehingga kualitas laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ideal.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (2022) yang menemukan adanya kesalahan administrasi keuangan di beberapa OPD yang belum sepenuhnya sesuai dengan SAP. Selain itu, keterlambatan penyampaian laporan dan inkonsistensi dalam pencatatan transaksi juga masih menjadi kendala yang berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak

hanya ditentukan oleh hasil akhir berupa opini, tetapi juga oleh proses penyusunan yang melibatkan berbagai faktor internal organisasi.

Secara teoritis dan empiris, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya kompetensi akuntansi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pemilihan variabel-variabel ini didasarkan pada indikator yang secara langsung menentukan kualitas laporan keuangan, yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pertama, kompetensi akuntansi menjadi faktor fundamental karena berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi keuangan sesuai standar. Indikator kompetensi meliputi tingkat pendidikan, pemahaman terhadap SAP berbasis akrual, pengalaman kerja, serta kemampuan teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Rendahnya kompetensi dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, ketidaktepatan pengakuan transaksi, serta ketidakakuratan laporan.

Kedua, sistem informasi akuntansi (SIA) berperan dalam mendukung proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan secara efektif dan efisien. Indikator SIA mencakup kualitas sistem (keandalan dan kemudahan penggunaan), kualitas informasi (akurasi dan ketepatan waktu), serta kualitas layanan sistem. Sistem yang tidak optimal dapat menyebabkan keterlambatan laporan, inkonsistensi data, serta meningkatnya risiko kesalahan.

Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Indikator kepatuhan meliputi tingkat ketaatan terhadap SAP, peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasional standar dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketidakpatuhan dapat berdampak pada penyimpangan laporan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa masih terdapat inkonsistensi dan variasi temuan tergantung pada konteks organisasi dan daerah. Selain itu, sebagian besar

penelitian hanya menguji variabel secara parsial atau terbatas pada satu jenis instansi, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif.

Fenomena kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng juga dapat dijelaskan melalui perspektif Resource-Based View (RBV) dan Resource-Based Theory (RBT), yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya internal organisasi. RBV memandang bahwa kinerja organisasi, termasuk dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sementara itu, RBT menegaskan bahwa keunggulan organisasi akan tercapai apabila memiliki sumber daya yang bernilai (valuable), langka (rare), sulit ditiru (inimitable), dan tidak mudah digantikan (non-substitutable). Dalam konteks pemerintah daerah, sumber daya tersebut tercermin dalam kompetensi akuntansi aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kompetensi akuntansi menjadi representasi dari kualitas sumber daya manusia yang berperan langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, di mana kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman menjadi faktor penentu keandalan informasi yang dihasilkan. Di sisi lain, sistem informasi akuntansi mencerminkan sumber daya teknologi yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan akurasi dalam pengolahan data keuangan. Adapun kepatuhan terhadap peraturan merupakan bentuk kapabilitas organisasi dalam memastikan bahwa setiap proses pelaporan keuangan telah sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan perspektif RBV dan RBT, kualitas laporan keuangan pada OPD tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi, tetapi sangat bergantung pada kemampuan internal organisasi dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya tersebut secara terpadu.

Novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel utama, yaitu kompetensi akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan kepatuhan terhadap peraturan, dalam satu model penelitian yang diuji secara simultan pada OPD di Kabupaten Buleleng. Kedua, penelitian ini tidak hanya melihat kualitas laporan keuangan dari sisi hasil (opini WTP), tetapi juga mengkaji kualitas pada level operasional OPD yang masih

menghadapi berbagai permasalahan. Ketiga, penelitian ini mengadopsi pendekatan teoritis kombinasi antara teori agensi dan Resource-Based View (RBV), yang masih jarang digunakan secara bersamaan dalam konteks penelitian sektor publik daerah. Keempat, penelitian ini menggunakan konteks Kabupaten Buleleng yang memiliki karakteristik kompleks, sehingga memberikan kontribusi empiris yang lebih kontekstual dan spesifik.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat kualitas laporan keuangan memiliki implikasi langsung terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, transparansi pengelolaan keuangan, serta tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini berjudul "Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, serta Kepatuhan pada Peraturan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng" menjadi relevan untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan secara lebih komprehensif dan mendalam.

1.2 Identifikasi Masalah

a. Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Buleleng belum optimal

   Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, meskipun Kabupaten Buleleng memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih ditemukan kelemahan terkait pencatatan aset, kesalahan klasifikasi akun, dan keterlambatan penyampaian laporan (BPK RI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan masih dapat ditingkatkan.

b. Kompetensi Akuntansi yang belum merata

   Beberapa pegawai pengelola keuangan belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kurang optimal (Risma Nita & Herawati, 2025). Hal ini berdampak pada akurasi dan keandalan laporan keuangan.

c. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang belum maksimal

Meskipun OPD telah menggunakan aplikasi SAKD/SIPKD, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan, keterbatasan fitur, dan rendahnya keterampilan pegawai dalam memanfaatkan sistem (Darmayani et al., 2024).

d. Kepatuhan terhadap peraturan yang belum konsisten

Terdapat indikasi bahwa sebagian OPD masih belum sepenuhnya mematuhi regulasi terkait penyusunan laporan keuangan, baik dari segi waktu penyampaian maupun kesesuaian dengan ketentuan Permendagri No. 64 Tahun 2013 (Iqbal et al., 2022).

e. Minimnya penelitian yang mengkaji ketiga variabel secara simultan di Kabupaten Buleleng

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya meneliti pengaruh satu atau dua variabel terhadap kualitas laporan keuangan, atau dilakukan di daerah lain (Binawati & Nindyaningsih, 2022; Tumelap et al., 2024). Hal ini membuka peluang penelitian yang lebih komprehensif.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh tiga variabel internal organisasi, yaitu kompetensi Akuntansi, sistem informasi akuntansi (SIA), serta kepatuhan pada peraturan, terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Adapun pembatasan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Objek Penelitian ini memfokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

b. Variabel Penelitian

Penelitian hanya memfokuskan pada tiga variabel bebas, yaitu:

a) Kompetensi Akuntansi
b) Sistem Informasi Akuntansi (SIA)
c) Kepatuhan terhadap Peraturan
d) serta satu variabel terikat, yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

c. Batasan Konteks penelitian ini membatasi pembahasan pada aspek pelaporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Analisis tidak mencakup variabel lain seperti komitmen organisasi, budaya kerja, atau gaya kepemimpinan.
d. Batasan Waktu dan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer hasil kuesioner serta data sekunder yang relevan untuk tahun anggaran terakhir (2024).
e. Responden Penelitian ini dibatasi pada pegawai atau staf pengelola keuangan di OPD Kabupaten Buleleng yang memiliki tanggung jawab dalam proses penyusunan laporan keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah kepatuhan terhadap peraturan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh kompetensi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng.
2. Menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng.
3. Menganalisis pengaruh kepatuhan terhadap peraturan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini

sejalan dengan temuan Kurniawan & Nadirsyah (2017) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi Akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi.

b. Memperkaya literatur yang mengintegrasikan variabel kompetensi Akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam satu model penelitian pada konteks organisasi perangkat daerah (OPD).

c. Memberikan landasan teoritis untuk menguji kembali hubungan antarvariabel tersebut pada konteks daerah yang memiliki kompleksitas tata kelola tinggi seperti Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng: Memberikan masukan empiris untuk meningkatkan kapasitas Pegawai, memperkuat infrastruktur dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi, serta memperketat kepatuhan terhadap peraturan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Temuan ini mendukung rekomendasi Indriasari & Nahartyo (2008) bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dapat meningkat jika ketiga aspek tersebut diperhatikan secara simultan.

b. Bagi OPD di Kabupaten Buleleng: Menjadi dasar evaluasi internal untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta pelatihan pemahaman terhadap akuntansi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menyediakan referensi penelitian dengan kerangka teoritis dan empiris yang dapat dikembangkan di wilayah atau sektor lain, sekaligus mengisi gap penelitian terkait keterpaduan variabel di daerah dengan karakteristik geografis dan administratif seperti Buleleng.